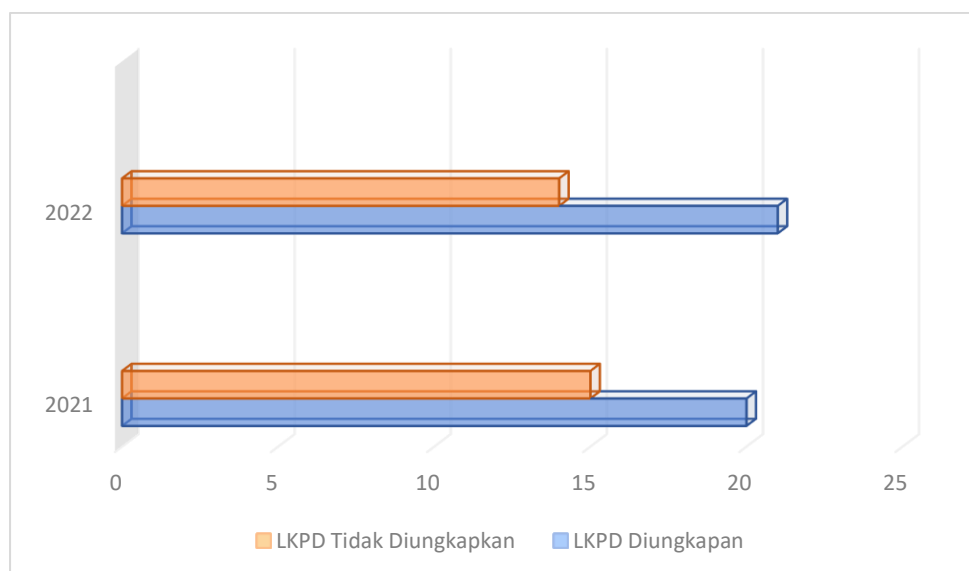


Ketidaklengkapan dan ketidaktersediaan laporan keuangan yang akurat dan terkini dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan mempengaruhi kemampuan publik untuk memahami dan mengevaluasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan melakukan pengungkapan laporan keuangan dan memublikasikannya dengan lengkap dan akurat melalui website resmi mereka. Hal ini akan membantu memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada publik adalah transparan, akurat, dan dapat dipercaya.

Gambar 1.1

Grafik Publikasi LKPD di Situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Website pemda kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, 2023

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah jadi salah satu dari 10 provinsi terbaik dalam mewujudkan *e-government*. Pemanfaatan teknologi informasi dalam

pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terus berkembang menunjukkan 20 pemerintah daerah dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah telah mengungkapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di situs web resmi pada tahun 2021 sisanya 15 kabupaten/kota tidak melakukan pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di situs web resmi. Sedangkan, pada tahun 2022 naik menjadi 21 pemerintah daerah yang mengungkapkan LKPD pada situs web resmi pemerintah daerah dan.

Grafik di atas menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah Jawa Tengah telah memublikasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) masing-masing kabupaten/kota di situs web resmi, tetapi fakta saat ini menunjukkan bahwa beberapa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota di Jawa Tengah masih belum tersedia di situs web resmi pemerintah daerah. Situs web resmi pemerintah daerah sebagian besar tidak menampilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), situs web berfokus pada publikasi berita tentang peraturan-peraturan pemerintah dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan informasi keuangan terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui situs web yang mudah diakses dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan kepada publik (Verawaty, 2014).

Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu faktor yang memengaruhi

pemerintah daerah dalam melakukan pengungkapan laporan keuangan di situs web. Sebagai auditor eksternal di Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dan memberikan opini audit berdasarkan temuan hasil audit. Opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi salah satu indikator kualitas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah (Nor et al., 2019). Handayani (2010) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan di situs web pemerintah daerah karena semakin banyak kesalahan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan keuangan pemerintah daerah selama audit, pemerintah daerah cenderung tidak memublikasikan laporan keuangan tersebut kepada publik.

Proses audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghasilkan laporan yang berisi temuan audit. Temuan audit menunjukkan pemerintah daerah telah melanggar aturan yang berlaku baik melanggar undang-undang maupun adanya kelemahan sistem pengendali internal pemerintah daerah. Auditor berkewajiban untuk menindaklanjuti temuan hasil audit atas laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh BPK selama proses audit, untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan BPK telah diimplementasikan secara efektif dalam menyelesaikan masalah atau ketidaksesuaian yang ditemukan (Nor et al., 2019).

Tindak lanjut atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah diatur dalam peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) No. 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Tindak Lanjut

Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Peraturan tersebut mengklasifikasikan ke dalam empat kategori tindak lanjut hasil audit, yaitu tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, rekomendasi belum ditindak lanjuti, dan rekomendasi tidak dapat ditindak lanjuti. Sistem klasifikasi membantu menentukan tingkat kepatuhan dan keseriusan dalam menanggapi hasil pemeriksaan serta memastikan perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintah.

Menurut Nor et al., (2019) pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara dan berkewajiban untuk menindaklanjuti temuan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satu bagian penting dari penilaian kinerja manajemen adalah respons pemerintah daerah dalam melaksanakan tindak lanjut rekomendasi audit (Hartono, 2006). Semakin responsif pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi audit, maka akan berdampak pada keinginan untuk mengungkapkan laporan keuangan di situs web resmi pemerintah daerah sebagai bentuk peningkatan dan kepatuhan pemerintah daerah terhadap aturan yang berlaku.

Pérez et al., (2008) menyatakan tingkat pendidikan masyarakat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk mengungkapkan laporan keuangan. Perkembangan *e-government* sangat bergantung pada tingkat pendidikan masyarakat (Evans & Yen, 2005). Meningkatkan kualitas pendidikan mendukung inovasi dalam perkembangan teknologi yang dapat diadopsi oleh pemerintahan untuk mengembangkan sistem *e-government*, meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam menggunakan layanan *e-government*, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dapat berdampak pada dukungan finansial dan sumber daya untuk pengembangan dan pemeliharaan *e-government* yang berkelanjutan. Penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pengungkapan informasi (Chaudhuri et al., 2005).

Pendapatan per kapita daerah memengaruhi pengungkapan informasi keuangan, meningkatkan pengawasan politik, dan menarik perhatian masyarakat (Nor et al., 2019). Daerah dengan pendapatan per kapita tinggi cenderung meningkatkan transparansi dan pengungkapan informasi keuangan karena masyarakat daerah tersebut sadar hak-hak mereka untuk mendapatkan informasi keuangan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintah. Dalam konteks politik, harapan dan kebutuhan masyarakat terkait kualitas layanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya yang dapat menciptakan tekanan politik bagi pemerintah. Tekanan politik yang lebih besar dapat dilihat dari tuntutan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah.

Masyarakat yang kritis akan menyadari dampak pengelolaan keuangan publik memengaruhi kualitas hidup mereka lewat layanan publik dan fasilitas yang disediakan pemerintah daerah. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan keuangan atas kualitas pelayanan publik dan fasilitas yang disediakan pemerintah daerah mendorong masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana publik. Pengawasan yang dilakukan masyarakat terkait penilaian alokasi anggaran, pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan transparansi penggunaan dana publik. Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan informasi keuangan yang mudah

diakses oleh masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Nor et al., 2019).

Martini (2015) menyatakan bahwa masyarakat suatu daerah dengan tingkat kesejahteraan tinggi akan menuntut pengungkapan laporan keuangan maupun informasi non keuangan kepada pemerintah daerah. Pengungkapan laporan keuangan membantu masyarakat mengawasi serta memastikan dana publik telah direalisasikan sesuai rencana, informasi non keuangan membantu masyarakat mengetahui efektivitas program pelayanan pemerintah daerah. Masyarakat membutuhkan informasi keuangan maupun non keuangan karena secara tidak langsung mereka telah berkontribusi kepada daerah melalui pembayaran pajak, salah satunya pajak restribusi daerah.

Kepala daerah yang berkomitmen pada akuntabilitas dan transparansi menunjukkan sikap tanggung jawab atas pengelolaan dana publik dengan memberikan akses informasi keuangan kepada masyarakat. Komitmen kepala daerah menjadi dasar yang kuat untuk membuat keputusan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepala daerah. Laporan keuangan menjadi instrumen utama dalam penyajian informasi keuangan karena menunjukkan keadaan keuangan pemerintah yang dapat dievaluasi oleh pihak internal dan eksternal, termasuk auditor. Auditor memberikan opini atas audit laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin berkomitmen kepala daerah terhadap kualitas laporan keuangan, semakin besar kemungkinan mendapatkan opini audit yang baik. Opini audit yang baik meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat dan pemangku kepentingan. Kepala daerah juga lebih percaya diri dan

terdorong untuk memublikasikan laporan keuangan kepada publik setelah mendapat opini yang baik. Pengungkapan laporan keuangan secara *online* pada situs web resmi pemerintah daerah merupakan cara pemerintah daerah menyampaikan informasi keuangan sebagai bukti bahwa pemerintah daerah telah transparansi mengenai keuangan kepada masyarakat (Nor et al., 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah pada situs web resmi pemerintah yang sedang berkembang. Peneliti menguji dan menganalisis pengaruh opini audit, temuan audit, tindak lanjut rekomendasi audit, tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan, komitmen kepala daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan di situs web pemerintah daerah Jawa Tengah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan di Situs Web Pemerintah Daerah (studi kasus pada kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2022).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah opini audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan di situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2021-2022 ?

2. Apakah temuan audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan di situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2021-2022 ?
3. Apakah tindak lanjut rekomendasi audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan di situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2021-2022 ?
4. Apakah tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan di situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2021-2022 ?
5. Apakah tingkat kesejahteraan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan di situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2021-2022 ?
6. Apakah komitmen kepala daerah memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan di situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2021-2022 ?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Meneliti adanya pengaruh opini audit terhadap pengungkapan laporan keuangan di situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2020-2021.

2. Meneliti adanya pengaruh temuan audit terhadap pengungkapan laporan keuangan di situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2020-2021.
3. Meneliti adanya pengaruh tindak lanjut rekomendasi audit terhadap pengungkapan laporan keuangan di situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2020-2021.
4. Meneliti adanya pengaruh tingkat pendidikan terhadap pengungkapan laporan keuangan di situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2020-2021.
5. Meneliti adanya pengaruh tingkat kesejahteraan terhadap pengungkapan laporan keuangan di situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2020-2021.
6. Meneliti adanya pengaruh komitmen kepala daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan di situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2020-2021.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah
Peneliti berharap hasil penelitian ini akan menunjukkan penggunaan teknologi untuk menyajikan laporan keuangan di situs web pemerintah daerah dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas pemerintah.

2. Bagi Masyarakat

Dari penelitian ini diharapkan masyarakat lebih kritis dan aktif tentang pentingnya akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah.

3. Bagi Akademisi

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi akademisi atau periset sehingga dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai tambahan literatur untuk pengembangan riset.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I, peneliti akan menjelaskan latar belakang permasalahan, yang merupakan dasar pemilihan topik penelitian. Bagian perumusan masalah memberikan informasi mengenai situasi yang memerlukan solusi dan menjadi landasan pemilihan topik penelitian. Sementara itu, tujuan dan manfaat penelitian menjelaskan rencana pencapaian yang diinginkan oleh peneliti, dan struktur penulisan memberikan gambaran singkat tentang bagaimana setiap bab akan disusun.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II membahas *agency theory* dan *learning organization theory* sebagai dasar teori dalam penelitian, serta akan membahas temuan dari penelitian sebelumnya. Dengan menggunakan dasar teori serta

penelitian sebelumnya, akan dikembangkan kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis yang menjelaskan temuan sementara terkait dengan isu penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III menjelaskan metodologi yang digunakan dalam menganalisis topik penelitian. Dalam bab ini, akan diuraikan definisi operasional variabel, yang menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian dan menjelaskan apa yang menjadi populasi penelitian serta cara penentuan sampel termasuk jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian. Bagian metode pengumpulan data akan menjelaskan bagaimana data diperoleh dan teknik yang digunakan. Selanjutnya, dalam bagian metode analisis akan diuraikan teknik pengolahan data untuk menjawab rumusan masalah terkait opini audit, temuan audit, tindak lanjut rekomendasi audit, tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan, dan komitmen kepala daerah.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab VI mencakup hasil analisis data sesuai dengan metode analisis yang digunakan dalam metode penelitian, serta interpretasi hasil yang menggambarkan temuan dari analisis data berdasarkan teknik yang telah diterapkan dalam analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab V memuat kesimpulan dan ringkasan hasil penelitian sesuai dengan rumusan tujuan peneliti serta penemuan peneliti. Selain itu, bab ini juga membahas kelemahan penelitian dengan mengidentifikasi kekurangan yang ditemukan setelah dilakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi untuk penelitian berikutnya.